

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	0
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Koran Tempo

Kusut Data Penerima Bantuan Sosial

Sejumlah warga mampu mendapat bantuan bahan pokok, sementara warga miskin tidak tersentuh bantuan.

Gangsar Parikesit

gangsar@tempo.co.id

JAKARTA – Tony Hartawan tak habis pikir saat mendapati namanya masuk daftar penerima bantuan sosial dari pemerintah DKI Jakarta. Bukan apa-apa, karyawan perusahaan swasta itu tak merasa termasuk yang terimpit wabah Coronavirus Disease 2019 alias Covid-19.

Tanpa bermaksud pongah, rumahnya yang seluas 286 meter persegi di Cempaka Putih Barat, Jakarta Pusat, bisa dibilang gedongan. Selain kendaraan bermotor, di pojok garasinya terparkir sepasang sepeda Brompton.

Tony, 40 tahun, tak sendirian. Beberapa tetangganya di RT 06 RW 11, Cempaka Putih Barat, juga masuk daftar yang sama. "Data ini acuannya dari mana?" katanya kepada *Tempo*, kemarin.

Pemerintah DKI memberikan bantuan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan miskin yang terimbas wabah Covid-19. Bantuan berupa bahan pokok itu akan disalurkan bagi 1,2 juta keluarga pada 9-24 April ini.

Hingga kemarin, pemerintah DKI telah menyalurkan sekitar 400 ribu paket bahan pokok. Bantuan berupa beras 5 kilogram, 2 kaleng kecil sarden, minyak goreng 0,9

liter, 2 bungkus biskuit, 2 masker kain, dan 2 batang sabun mandi itu telah didistribusikan ke sejumlah kelurahan. "Kalau dikasih, saya akan kembalikan ke ketua RT dengan tanda bukti," kata Tony.

Warid, Ketua RT 06 RW 11 Cempaka Putih Barat, mengatakan Tony merupakan satu dari 35 keluarga di sana yang menjadi calon penerima bantuan. Menurut dia, pengurus lingkungan tidak dilibatkan dalam pendataan. Mereka hanya menerima data dari dinas sosial.

Ketidakakuratan data bantuan sosial juga terjadi di RW 07 dan 16, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara. Beberapa warga berkecukupan di dua rukun wilayah itu mengembalikan paket bantuan tersebut ke PD Pasar Jaya. "Dikembalikan sekitar 40 paket," ujar Lurah Kelapa Gading Barat, Abdul Buang.

Lurah pun tak tahunahu soal pendataan. Abdul mengatakan mereka hanya menerima data dan diminta mengawasi penyaluran bantuan. Di kelurahan di Jakarta Utara tersebut, 2.225 paket telah disalurkan. Dari distribusi perdana, petugas kelurahan mendapati ada 2.000-an keluarga yang perlu bantuan tidak mendapatkan haknya. Abdul pun menyusulkan data tambahan untuk pemba-

gian tahap selanjutnya.

Di Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat, terjadi hal serupa. Wakil Ketua RW 12, Poly Siahaya, mengatakan terdapat dua paket bantuan yang diretur warganya yang bekerja sebagai pegawai negeri dan anggota TNI. "Kami kembalikan pakatnya ke kelurahan," kata Abdul.

Kalau sudah begini, Poly melanjutkan, pengurus RT/RW yang kena getahnya. Dia mengatakan pengurus dihujani pertanyaan dari warga yang merasa tidak mendapatkan haknya. "Kami jadi mendapat prasangka buruk," ujar Pembina Forum RT/RW DKI Jakarta itu.

Dinas Sosial mengakui data yang mereka kirim belum akurat. Namun mereka beralih hanya sebagai *user*. "Kami hanya distribusikan sesuai dengan data dari Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik," kata Ika Yuli Rahayu, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial DKI Jakarta.

Agar bantuan selanjutnya lebih tepat sasaran, dia melanjutkan, petugas meminta pengurus RT/RW membenahi data sesuai dengan kenyataan di lapangan. "Akan diolah sebagai data calon penerima bantuan tahap berikutnya," ujarnya.

Koharudin, Kepala Hubungan Media Dinas

Komunikasi, Informatika, dan Statistik DKI Jakarta, mengatakan sumber data mereka adalah 1,2 juta keluarga penerima bantuan sosial yang ada di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), data Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, data penduduk dengan disabilitas, data Kartu Lansia Jakarta, data Kartu Jakarta Pintar, data Bantuan Program Pangan, serta data pekerja yang terkena dampak Covid-19.

Dinas Kominfo, Koharudin melanjutkan, bertindak sebagai pengumpul, pengolah, serta pengintegrasian data. Untuk menghindari nama ganda, misalnya, mereka "membersihkan data" bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. "Kesesuaian dan validitas data yang diolah tersebut juga sangat ditentukan oleh data awal yang kami terima," ujarnya.

Koharudin mengatakan mereka akan memverifikasi ulang data 1,2 juta keluarga tersebut bersama suku dinas sosial masing-masing wilayah untuk bantuan tahap kedua. Data dari pengurus RT/RW, dia menambahkan, akan diakomodasi di proses ini. "Data penerima bantuan sosial Covid-19 ini bersifat dinamis dan dapat diperbarui," kata dia. ●